

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-Buku:**

- Abdul Latif, M. Syarif Nur, Hamza Baharuddin, Hasbi Ali, dan Said Sampara, *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Total Media, Yogyakarta, 2009.
- A.V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution (Pengantar Studi Hukum Konstitusi)*, Cetakan Keempat, Nusa Media, Bandung, 2014.
- Bagir Manan, *Hukum Positif Indoneisa (Suatu Kajian Teoritik)*, UII Press, Yogyakarta, 2004.
- Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, *Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Bambang Sutiyoso, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Keempat, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- C.F. Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk*, Cetakan Ketiga, Nusa Media, Bandung, 2010.
- Hans Kelsen, *The General Theori of Law and State (Teori Umum Tentang Hukum dan Negara)*, Cetakan Ke-Sepuluh, Nusa Media, Bandung, 2015.;
- Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Janedri M. Gaffar, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2013.
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Cetakan Ketiga, Raja Grafindo, Jakarta, 2014.
- \_\_\_\_\_, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, BIP, Jakarta, 2009.
- Mahfud MD, *Gusdur: Islam, Politik, dan Kebangsaan*, LKIS, Yogyakarta, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Politik Hukum di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cetakan Kelima, 2012.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonsia, *Catatan Tiga Tahun Mahkamah Konstitusi Menegakkan Negara Hukum yang Demokratis*, Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi.

- Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Jakarta, 2007.
- Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Sutu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Iplementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992.
- Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Cetakan Empat, PT RajaGrafindo Persada, 2014, Jakarta.
- Rita Triana Budiarti, *Hamdan Zoelva: Pergulatan Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2015.;
- Saifudin, *Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Sarja, *Negara Hukum: Teori dan Praktek*, Thafa Media, Yogyakarta, 2016.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2010.
- Soimin, *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Negara di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2010.
- Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaran Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2013.
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010.

#### **Jurnal dan Makalah Hukum:**

- Janedri M. Ghafar, *Kedudukan, fungsi, dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 17 Oktober 2009.
- Jimly Asshiddiqie, *Konsep Negara Hukum Indonesia*, Ceramah Umum di Universitas Jayabaya Jakarta, Januari 2010.

Mahfud MD, *Politik Hukum Menuju Pembangunan Sistem Hukum Nasional*, Seminar *Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen*, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Hukum dan HAM.

Suroto, *Macam-Macam Konsep Negara Hukum*, Jurnal Konstitusi Volume 1 No. 1, November 2012.

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Prosedur Beracara Pembubaran Partai Politik.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 Pedoman Beracara Dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presdien dan/atau Wakil Presiden.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi.

### **Risalah Sidang:**

Risalah Sidang Perkara Nomor 42/PUU-XII/2014, Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, dengan agenda mendengarkan keterangan ahli/saksi dari pemohon, Mahkamah Konstitusi RI, Selasa 30 september 2014.

Risalah sidang Perkara nomor 59/PUU-XIII/2015, Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan agenda mendengarkan keterangan ahli pemohon, Mahkamah Konstitusi RI, Rabu 12 agustus 2015.

Risalah sidang perkara nomor 28/PUU-XIV/2016, Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan Ahli/saksi Pemohon, Mahkamah Konstitusi RI, Kamis 19 mei 2016.

Risalah Sidang Perkara Nomor 138/PUU-XIII/2015, Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan agenda mendengarkan keterangan ahli pemohon dan ahli/saksi presiden, Mahkamah Konstitusi RI, Selasa 31 Mei 2016.

**Media Massa dan Elektroknik:**

Surat Kabar Harian Kompas tanggal 3 Agustus 2016.

<http://www.tempo.co/read/kolom/2014/01/06/1023/MK-Minus-Patrialis> diakses pada 20 Agustus 2016.